

BAB V

KESIMPULAN

Jumlah imigran yang melewati Laut Mediterania terus meningkat secara drastis selama beberapa tahun terakhir. Selama bertahun-tahun imigran telah menempuh rute tersebut untuk dapat sampai ke daratan Eropa. Laut Mediterania disebut sebagai jalur terpadat sekaligus paling mematikan yang dilalui oleh para imigran untuk sampai ke daratan Eropa. Banyaknya peristiwa kekerasan yang terjadi di Afrika dan Timur Tengah pada tahun 2011 seperti perang sipil, konflik dalam negeri, konflik karena perubahan ekonomi dan perubahan pemerintahan, perubahan ideologi, terorisme, konflik etnis, beserta semua peristiwa yang melanggar hak asasi manusia dan hak individu, membuat gelombang perpindahan penduduk di wilayah Afrika dan Timur Tengah menuju wilayah Eropa yang dirasa lebih aman menjadi tinggi. Mayoritas para migran berasal dari negara yang dilanda konflik seperti Afghanistan, Iraq, dan Suriah. Ada juga karena faktor ekonomi, sehingga mereka meninggalkan negara asalnya dengan harapan mendapatkan penghidupan yang layak. Benua Eropa dapat diibaratkan sebagai “Benua Harapan” bagi para migran. Benua Eropa yang makmur, aman, nyaman, dan secara jarak relatif dapat dijangkau membuat para migran ingin datang ke Eropa.

Kedekatan geografis antara Afrika dan Eropa, menyebabkan negara-negara seperti Italia, Yunani, dan Spanyol yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania menampung banyak migran yang datang dari Afrika Utara. Letaknya yang strategis, membuat negara-negara ini menjadi salah satu negara transit. Libya dan Tunisia merupakan negara di Afrika Utara yang berbatasan dengan pulau Lampedusa, Italia yang berjarak 73 mil dari Tunisia dan 159 mil dari Libya menjadikan pulau ini relatif dekat dari Tunisia dan Libya. Tunisia maupun Libya menjadi jalur para migran ilegal dari

berbagai negara yang akan menyeberang ke Italia. Rute Mediterania Tengah dapat ditempuh dari Libya menuju ke Italia atau Malta. Rute ini menjadi rute yang sering digunakan oleh para penyelundup atau pedagang manusia. Sehingga menyumbang angka kematian yang tinggi. Untuk menindaklanjuti hal ini, Uni Eropa bekerjasama dengan pemerintah Libya membentuk suatu operasi yang disebut dengan Operasi Med Eunavfor (*Mediterranean European Naval Force*) namun lebih dikenal dengan nama Operasi Sophia.

Operasi Med Eunavfor merupakan salah satu elemen dari upaya Uni Eropa dalam menangani isu krisis migran di Eropa yang belakangan menimpa Eropa. Operasi Med Eunavfor dibentuk pada tanggal 22 Juni 2015. Namun operasi ini baru aktif pada bulan Oktober 2015. Pada awalnya Operasi Med Eunavfor memiliki tugas inti yaitu melakukan upaya sistematis untuk mengidentifikasi, menangkap, dan menghancurkan kapal yang digunakan oleh para pelaku penyelundupan dan perdagangan manusia. Selain itu, operasi ini juga ikut berkontribusi dalam mengurangi banyaknya korban jiwa di Laut Mediterania khususnya Rute Mediterania Tengah. Kemudian, pada tanggal 20 Juni 2016 Dewan Uni Eropa menambahkan dua tugas tambahan yaitu melatih penjaga pantai dan angkatan laut Libya dan memberikan kontribusi untuk pelaksanaan embargo senjata PBB di lepas pantai Libya sesuai dengan UNSCR.

Namun pada tanggal 4 Juli 2017, Uni Eropa menyatakan dalam sebuah laporan bahwa Operasi Med Eunavfor telah gagal dalam mencapai tujuannya. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang berisi “menanggapi mandatnya, misi angkatan laut Uni Eropa dalam Operasi Med Eunavfor telah gagal mencapai tujuannya untuk mengurangi jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia di Laut Mediterania.”

Dalam ranah analisis, penulis mengungkapkan kegagalan Operasi Med Eunavfor dalam studi kasus ini, dengan menggunakan Teori Efektifitas Rezim yang dikemukakan oleh

Arild Underdal. Penulis dapat menyimpulkan terdapat 2 faktor yang menyebabkan upaya Operasi Med Eunavfor tidak maksimal. Pertama, peningkatan arus imigran di Eropa memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Kedua, Uni Eropa belum memiliki pengalaman dalam menghadapi peningkatan arus imigran yang hebat, kemudian kinerja penjaga pantai dan angkatan laut Libya kurang maksimal dan armada militer kurang cocok untuk menjalankan misi pencarian dan penyelamatan.

Pertama, yaitu krisis migran di Eropa memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dan Uni Eropa belum memiliki pengalaman terhadap isu krisis migran yang sehebat saat ini. Tingginya tingkat kerumitan yang dialami oleh Operasi Med Eunavfor memberikan kendala yang cukup berarti. Efektif atau tidaknya suatu rezim ditentukan oleh seberapa gawat persoalan yang dihadapi. Semakin gawat atau rumit suatu persoalan yang dihadapi oleh suatu rezim, maka keefektifan suatu rezim akan semakin kecil (Underdal, 2001).

Terdapat 3 indikator dalam problem malignancy, yaitu incongruity, asymmetry, dan cumulative cleavages. Incongruity yaitu ketidaksepahaman akibat tidak semua negara anggota dari sebuah rezim menganggap sebuah isu sebagai permasalahan. Kemudian, asymmetry yaitu adanya kepentingan nasional yang berbeda-beda antara negara anggota dari sebuah rezim. Selanjutnya, cumulative cleavage yaitu Perbedaan yang terakumulasi sehingga menimbulkan perpecahan.

Pada indikator pertama yaitu incongruity, semua negara yang tergabung di Operasi Med Eunavfor merasakan dampak yang melibatkan oleh peningkatan arus imigran di Eropa. Ini berarti indikator ini tidak terpenuhi.

Padandikator kedua yaitu asymmetry, Operasi Med Eunavfor memiliki mandat dari Dewan Uni Eropa untuk memerangi jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia di laut mediterania khususnya rute mediterania tengah.

Kemudian, terdapat 4 fase dalam Operasi Med Eunavfor untuk menjalankan misinya. Fase 3 dan 4 tidak dapat berjalan karena adanya kepentingan nasional yang berbeda antara negara yang tergabung dalam Operasi Med Eunavfor.

Permasalahan ini bertambah rumit dan kompleks karena para penyelundup bertransformasi dalam melancarkan aksinya. Sabratha, Libya dulunya menjadi titik awal keberangkatan para imigran ilegal yang menggunakan jasa penyelundup. Namun, sejak tahun 2013, Sabratha tidak lagi menjadi titik awal keberangkatan para imigran ilegal karena adanya intensifikasi pengawasan pemerintah Libya. Saat ini, pelaku penyelundupan dan perdagangan manusia juga lebih teratur dalam menjalankan aksinya. Mereka bekerjasama dengan agen perjalanan. Bahkan, para penyelundup juga telah bekerjasama dengan petugas keamanan Libya. Hal ini berarti indikator asymmetry terpenuhi.

Pada indikator ketiga yaitu cumulative cleavages, Untuk menjalankan Operasi Med Eunavfor, Uni Eropa bekerjasama dengan NATO dan Libya. Namun pada tahun 2016, NATO dan Uni Eropa menghadapi kesulitan dalam hal koordinasi intelijen dengan Libya. Hal ini berarti indikator cumulative cleavages terpenuhi.

Kedua, Uni Eropa belum memiliki pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan krisis migran yang hebat seperti saat ini. Hal ini menyebabkan Uni Eropa kebingungan dalam menerima para imigran yang datang terus-menerus. Hal ini menjelaskan bahwa Uni Eropa tidak memiliki kapabilitas dalam menghadapi peningkatan arus imigran yang hebat seperti sekarang. Fenomena imigrasi memang bukanlah fenomena yang pertama kali dirasakan oleh Eropa, namun peningkatan arus imigran yang saat ini dirasakan oleh Uni Eropa merupakan yang paling hebat pasca Perang Dunia 2.

Kinerja penjaga pantai dan angkatan laut Libya kurang maksimal dan armada militer kurang cocok untuk menjalankan misi pencarian dan penyelamatan. Pada tanggal 20

Juni 2016, Dewan Uni Eropa secara resmi menambahkan dua tugas tambahan untuk Operasi Med Eunavfor. Dua tugas tambahan itu adalah melatih penjaga pantai dan angkatan laut Libya dan memberikan kontribusi terhadap embargo senjata di lepas pantai Libya sesuai dengan UNSCR. Namun penjaga pantai dan angkatan laut Libya baru mulai aktif bekerja pada pertengahan tahun 2017 setelah Uni Eropa baru mulai memantau penjaga pantai dan angkatan laut Libya dengan menggunakan beberapa kamera Go-Pro, pesawat terbang dan kapal yang digunakan untuk mengamati kinerja para personel penjaga pantai dan angkatan laut Libya.

Kemudian, untuk menjalankan misi pencarian dan penyelamatan, dan mengurangi jaringan penyelundup manusia dan perdagangan manusia Operasi Med Eunavfor didukung 7 kapal, 4 pesawat, dan 4 helikopter dari negara anggota Uni Eropa. Semua armada ini merupakan armada perang. Armada perang dirasa kurang tepat karena biaya perawatan yang lebih mahal, dan akan lebih tepat apabila armada yang digunakan memang armada atau peralatan yang menunjang untuk misi penyelamatan karena selain biaya perawatan yang lebih murah, kapal khusus penyelamatan akan lebih *safety*.